



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers: 159/HUMAS PMK/VII/2021

Menko PMK: Vaksinasi Gotong-royong bukan Komersialisasi, tapi Percepat Herd Immunity

*Stok Vaksin 130 Juta, yang Sudah Disuntikkan 50 Juta

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki tujuan komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong-royong. Hal tersebut semata-mata untuk mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok di masa pandemi Covid-19.

“Jadi ini betul-betul harus dipahami. Tidak ada niat pemerintah untuk lari dari tanggung jawab, cuci tangan, juga tidak ada niat untuk komersial apalagi jualan. Ini tujuannya adalah kepentingan, kemaslahatan bersama untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok,” tegasnya usai mengunjungi PT Konimex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (16/7).

Dijelaskan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok perlu 70% minimum penduduk Indonesia yang sudah divaksin atau sekitar 187 juta jiwa. Faktanya, laporan Menteri Kesehatan Budi G Sadikin kepada Presiden Joko Widodo, saat ini dari 130 juta vaksin yang tersedia baru sekitar 50 juta yang sudah disuntikkan.

Dengan vaksinasi gotong-royong, karyawan perusahaan, individu, dan keluarga individu yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha dapat melakukan vaksinasi berbayar.

“Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam pandemi ini yaitu vaksin. Ini sifatnya sukarela jadi tidak ada paksaan, baik itu yang sifatnya kolektif perusahaan maupun individu-individu yang ingin mendapatkan vaksin gotong-royong itu,” ungkapnya.

“Jadi tidak ada sama sekali pemerintah memaksa, sifatnya sekali lagi sukarela. Siapa tahu karena alasan-alasan tertentu itu ada yang ingin mendapatkan vaksin melalui jalur gotong-royong. Tapi kalau tidak mau tunggu sampai betul-betul mendapatkan vaksin dari pemerintah. Tidak ada masalah sebenarnya,” imbuh Menko PMK didampingi Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Direktur PT Konimex.

Sementara itu, beberapa perusahaan seperti PT Konimex yang memiliki 40 ribu karyawan sebetulnya juga sudah ingin melakukan vaksinasi gotong-royong untuk karyawannya namun terhambat oleh akses vaksin yang masih lambat. Oleh karenanya, Menko PMK mengusulkan agar vaksinasi gotong-royong dapat segera dilaksanakan.

“Vaksin berbayar kebijakannya sudah final, cuma teknis saja yang harus dibenahi. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha sampai sekarang tidak mengikutkan vaksin gotong-royong untuk karyawannya itu bukan karena tidak mau, tetapi memang untuk mendapatkan akses yang cepat terhadap fasilitas vaksin itu kurang,” tuturnya.

Ia menyebut bahwa nantinya akan ada kebijakan khusus. Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN supaya hal itu bisa mendapat perhatian sehingga vaksinasi

gotong-royong dapat segera dilaksanakan demi kemaslahatan bersama untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Vaksin Cukup Pakai KTP

Menyikapi adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapat vaksinasi gratis karena Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang berbeda dengan domisili, Menko PMK menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat. Siapapun, menurutnya, selama merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP maka berhak mendapatkan vaksinasi.

“Sudah ada SE Menkes bahwa sekarang ini vaksinasi tidak lagi berbasis domisili KTP. Yang penting punya KTP, ada outlet vaksinasi entah itu yang dilaksanakan oleh Kemenkes atau TNI/Polri, silakan datang bawa KTP saja cukup, tidak harus dipersoalkan domisilinya mana saja,” cetus Muhadjir.

Lebih lanjut, menurutnya, apabila ada petugas yang menolak vaksinasi dengan alasan KTP tidak memenuhi syarat dapat dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab di wilayah setempat.

“Karena sudah diinstruksikan oleh Presiden langsung, jadi bisa dilaporkan kepada yang bertanggung jawab yaitu TNI Polri. Jadi bisa ke Kapolsek setempat. Intinya tidak ada pembatasan vaksin atas dasar domisili. Pokoknya punya KTP, cukup langsung bisa divaksin” pungkas Menko PMK. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**